



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana

Q

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);

13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dengan sebutan lain Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Blitar.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang secara substantif RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja

2

Walikota terpilih setelah diselaraskan dengan arah kebijakan dan pokok-pokok program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi (RPJMP).

9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA – SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja-PD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- (2) Renja-PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA – SKPD.

Pasal 3

- (1) Renja – PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : Pendahuluan.
 - BAB II : Hasil Evaluasi Renja – PD Tahun Lalu.
 - BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.
 - BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.
 - BAB V : Penutup.
- (2) Rincian Renja – PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Renja-PD Tahun 2024 terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
2. Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2024;
3. Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
4. Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2024;
5. Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024;
6. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2024;
8. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2024;
9. Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2024;
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar Tahun 2024;
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2024;
12. Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2024;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2024;
14. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2024;
15. Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024;
16. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kota Blitar Tahun 2024;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2024;
18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2024;
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2024;
20. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2024;
21. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2024;
22. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2024;
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
24. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2024;
26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2024;
27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
28. Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2024;
29. Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2024;
30. Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2024.

2

Pasal 5

Dalam hal program dan kegiatan Renja – PD Tahun 2024 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berbeda dengan hasil pembahasan bersama DPRD, maka yang dipergunakan adalah program dan kegiatan hasil pembahasan bersama dengan DPRD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 10 Agustus 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

1. RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 7 ayat (2), Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP yang memuat tentang kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, serta pada pasal 33 ayat (3), bahwa Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Secara teknis penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, didalamnya memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Sebagai dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah, maka Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar 2024 disusun dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2024, berpedoman pada RPJMD dan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, Renstra Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, Renstra Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Tahun 2020-2024, Renstra Biro Organisasi serta Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
2. Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam Renja PD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif;

8. RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Disamping itu penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaraskan dengan dokumen perencanaan di tingkat pusat maupun provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Kerja (Renja) juga mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan.

Review hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan pencapaian target kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Secara ringkas penyusunan Renja Tahun 2024 Dinas Sosial Kota Blitar terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu:

1. Tahapan Persiapan; meliputi proses
 - (1) Pembentukan SK tim penyusun renja
 - (2) Orientasi tim kerja
 - (3) Penyusunan agenda tim kerja
 - (4) Penyiapan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Blitar.
2. Tahapan Penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2024; meliputi proses :
 - a. Penyusunan mengacu pada rancangan awal RKPD Kota Blitar 2024 dan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2021-2026 yang mengacu kepada RPJMD Kota Blitar 2021- 2026
 - b. Evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya
 - c. Pemecahan masalah yang sedang dihadapi
 - d. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat.
3. Pelaksanaan Forum OPD.

Dilakukan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah

Adapun tujuan pelaksanaan forum SKPD adalah untuk :

 - a) Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan;
 - b) Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

- c) Penyelarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah; dan
- d) Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah, sesuai dengan surat edaran Walikota Blitar tentang rancangan awal RKPD.

4. Penetapan Renja Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2024

Proses penetapan Renja Dinas Sosial Kota Blitar dilakukan setelah adanya penetapan RKPD Kota Blitar Tahun 2024. Langkah terakhir proses dari penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial Kota Blitar adalah melakukan penyempurnaan berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan, selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap Renja Dinas Sosial Kota Blitar oleh tim penyusun RKPD. Verifikasi dilakukan untuk memastikan rancangan Renja Dinas Sosial Kota Blitar sesuai dengan RKPD yang telah ditetapkan. Hasil verifikasi Renja SKPD yang telah sesuai dengan RKPD selanjutnya disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Blitar kepada Walikota Blitar melalui Bappeda Kota Blitar untuk mendapatkan pengesahan, dan selanjutnya Renja Perangkat Daerah ini digunakan sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS dan RAPBD tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Sosial Kota Blitar ini adalah :

- 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang – Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
14. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
26. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
29. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 868);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);

37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Nomor 41 Tahun 2023 Seri E);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
41. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Blitar;
42. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar tahun 2005 – 2025;
43. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
44. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
45. Peraturan Walikota Blitar No. 74 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 66 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2022 Nomor 74).
46. Peraturan Walikota Blitar Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 49);
47. Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2022 nomor 40);
48. Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar nomor 48 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2022 nomor 71).

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2024 sebagai penjabaran RPJMD dan Renstra tahun 2012-2026, yang disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar tahun 2024.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja ini adalah

1. Sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2024 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2024.
2. Merumuskan program dan kegiatan yang terarah dan tepat sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Blitar;

3. Sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2024;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
		1.1. Latar Belakang
		1.2. Landasan Hukum
		1.3. Maksud dan Tujuan
		1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	:	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
		2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
		2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Blitar
		2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Blitar
		2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
		2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	:	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
		3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
		1.5. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kota Blitar
		1.6. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
BAB IV	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	:	PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Guna memastikan kesinambungan serta kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dengan capaiannya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan terhadap Renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Tahun 2022 merupakan tahun pertama periode Renstra 2021-2026 dan dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka terdapat perbedaan indikator kinerja sub kegiatan antara tahun 2022 dan tahun 2023. Beberapa indikator sub kegiatan yang bisa ditelusuri historisnya bisa disajikan namun ada pula yang tidak bisa ditelusuri sehingga pada capaian tahun 2022 tidak disajikan. Adapun tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2023 disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD
Dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023
Kota Blitar

Nama PD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Th 2023	
						Target Renja PD Th 2022	Realisasi Renja PD Th 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
106.01.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84,6		82	82,70	100,85	82,4	83,48	98,68
106.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	100		100	100	100	100	100	100
106.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	31		6	6	100	6	12	38,71
106.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	55		11	11	100	12	23	41,82
106.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%	100		100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Th 2023	
						Target Renja PD Th 2022	Realisasi Renja PD Th 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
106.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	28		27	27	100	28	28	100
106.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	60		12	12	100	12	24	40,00
106.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	100		100	100	100	100	100	100
106.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	8		Beda Indikator			2	2	25,00
106.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	28		Beda Indikator			28	28	100
106.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	100		100	100.00	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Th 2023	
						Target Renja PD Th 2022	Realisasi Renja PD Th 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
106.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4		Beda Indikator			1	1	25,00
106.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12		Beda Indikator			3	3	25,00
106.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	20		Beda Indikator			5	5	25,00
106.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	40		Beda Indikator			10	10	25,00
106.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4		Beda Indikator			2	2	50,00
106.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60		12	12	100	12	24	40,00
106.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	200		50	61	122	30	91	45,50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Th 2023	
						Target Renja PD Th 2022	Realisasi Renja PD Th 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
106.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	%	100		100	100	100	100	100	100,00
106.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5		Beda Indikator			2	2	40,00
106.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%	100		100	100	100	100	100	100
106.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	240		48	48	100	48	48	20,00
106.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	52		Beda Indikator			13	13	25,00
106.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%	100		100	100	100	100	100	100
106.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17		15	15	100	15	15	88,24
106.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	16		Sub Keg baru		0	1	1	6,25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Th 2023	
						Target Renja PD Th 2022	Realisasi Renja PD Th 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
106.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	160		Beda Indikator			40	40	25,00
106.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1		1	1	100	1	1	100,00
106.02.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	100		100	100	100	100	100	100,00
106.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial	%	100		100	100	100	100	100	100,00
106.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	7		Beda Indikator			4	4	57,14
106.04.00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Peningkatan PMKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	%	19,69	13.59	2,57	2,58	100,39	0,89	17,06	86.59
106.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100		100	100	100	100	100	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Th 2023	
						Target Renja PD Th 2022	Realisasi Renja PD Th 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
106.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	625		125	125	100	130	255	40,80
106.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50		10	11	110	10	21	42,00
106.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	325		Beda Indikator			122	122	37,54
106.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	179		Beda Indikator			55	55	30,73
106.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar dan Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100		100	100	100	100	100	100,00
106.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1.050		Beda Indikator			270	270	25,71

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Th 2023	
						Target Renja PD Th 2022	Realisasi Renja PD Th 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
106.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	250		Beda Indikator			70	70	28,00
106.05.00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Peningkatan PMKS terlatih	%	160		32	50	156,25	24,2	74,2	46,38
.		Persentase penurunan Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial	%	6,81		1,36	1,82	133.82	1,38	3,2	46,99
106.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data DTKS yang diverval	%	100		100	100	100	100	100	100,00
		Persentase PMKS terlatih	%	100		20	30	150	20	50	50
		Persentase Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial	%	100		100	100	100	100	100	100,00
106.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	400		Beda Indikator			100	100	25,00
106.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	10.264		10.814	10.814	100	10.764	10.764	95,13

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Th 2023	
						Target Renja PD Th 2022	Realisasi Renja PD Th 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
106.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	400		120	120	100	80	200	50,00
106.06.00	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)	%	100		100	100	100	100	100	100,00
106.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang memperoleh bantuan sosial	%	100		100	100	100	100	100	100,00
106.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	157		13	13	100	37	50	31,85
106.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	356		50	50	100	70	120	33,71
106.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase TAGANA yang terampil dalam penanganan pasca bencana	%	100		81	88,00	106,64	84	84	84,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Th 2023	
						Target Renja PD Th 2022	Realisasi Renja PD Th 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
106.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	27		25	25	27	27	27	100
106.07.00	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP dalam kondisi baik	%	100		100	100	100	100	100	100,00
106.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang terpelihara	%	100		100	100	100	100	100	100,00
106.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	1.139		Beda Indikator			974	974	85,51

Target program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022 tercapai sesuai target bahkan ada beberapa yang melebihi target diantaranya program perlindungan dan jaminan sosial serta program rehabilitasi sosial. Program jaminan dan perlindungan sosial dengan indikator Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial tercapai 133,82%, indikator persentase PMKS terlatih tercapai 156,25%. Sementara Program Rehabilitasi Sosial dengan indikator Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial tercapai 100,39%. Namun masih dijumpai beberapa permasalahan diantaranya :

1. Belum optimalnya kapasitas dan kualitas SDM Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelayanan kesejahteraan sosial.
2. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti yang dilakukan dalam keluarga/masyarakat yang membutuhkan layanan rujukan, terkendala dengan daya tampung lembaga penerima rujukan.
3. Belum semua eks peserta pelatihan memanfaatkan bantuan peralatan usaha untuk merintis usaha.
4. Sering berubahnya data penerima Bantuan Sosial pusat sehingga masih dijumpai penerima Bansos ganda.
5. Bencana alam dan sosial tidak bisa diprediksi dan bisa terjadi sewaktu-waktu.

Program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 sampai dengan triwulan II secara umum berjalan lancar sesuai jadwal yang ditetapkan. Namun ada beberapa kendala yaitu kenaikan harga beras mengakibatkan tertundanya pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) karena adanya pelaksanaan ulang pengadaan beras yang disesuaikan dengan harga pasar. Beberapa jenis layanan Dinas Sosial bersifat insidental sehingga pelaksanaannya kondisional, diberikan ketika ada kejadian diantaranya layanan rujukan bagi PPKS terlantar, pemulangan orang terlantar, pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), fasilitasi akses kesehatan, pendidikan dan administrasi kependudukan bagi PPKS, bantuan sembako bagi korban bencana serta warga miskin yang sakit/mendapat musibah lainnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Blitar

Analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan dinas berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standart Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Blitar, capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Blitar

No	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK/ IKU	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Urusan Sosial											
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	SPM	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tahun 2022 jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terlayani sebanyak 484 dan pada tribulan I tahun 2023 sebanyak 93 orang
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	SPM	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tahun 2022 jumlah anak terlantar yang terlayani sebanyak 25 dan pada tribulan I tahun 2023 sebanyak 4 orang
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	SPM	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tahun 2022 jumlah Lansia terlantar yang terlayani sebanyak 188 dan pada tribulan I tahun 2023 sebanyak 129 orang

No	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK/ IKU	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Persentase gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	SPM	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tahun 2022 jumlah Gepeng yang terlayani sebanyak 28 dan pada tribulan I tahun 2023 sebanyak 1 orang
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota	SPM	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan terhadap korban bencana berdasarkan kejadian bencana baik bencana alam maupun bencana sosial. Tahun 2022 sebanyak 569 korban bencana yang mendapat bantuan bahan makanan (termasuk warga yang menjalani isolasi mandiri karena terinfeksi covid 19) dan tahun 2023 sampai dengan tribulan 1 sebanyak 1 orang
6	Persentase fakir miskin yang berdaya		IKU	100%	100%	100%	100%	15,7%	-	10%	10%	IKU ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah alumni peserta pelatihan yang mendapatkan Bansos peralatan usaha pada

No	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK/ IKU	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												tahun sebelumnya dengan total alumni dan tahun 2022 tercapai 15,7% (11 dari orang 70) sedang perhitungan tahun 2023 dijadwalkan pada tribulan II dan III
7	Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		IKU	1,45 %	1,47%	1,49%	1,52%	6,09	-	1,49%	1,52%	Perhitungan dilakukan pada akhir tahun anggaran

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kota Blitar

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diupayakan untuk memperbaiki fungsi sosial PPKS sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya, menjalin hubungan yang serasi dengan lingkungannya secara wajar dan bermartabat. Karakteristik PPKS cenderung memiliki mobilitas sosial yang sangat dinamis, sering berpindah-pindah sehingga jumlahnya selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu dan tidak akan pernah habis. Sebaran PPKS dengan segala permasalahannya di Kota Blitar tahun 2022 masih tergolong tinggi yaitu sebanyak 11.733, meskipun angka ini sudah menurun 6,09% dari tahun 2021. Angka ini masih didominasi oleh kelompok fakir miskin yang mencapai 10.650 jiwa disusul penyandang disabilitas 751 jiwa dan Lansia terlantar 139 orang. Hal ini tentunya memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Upaya mendorong kemandirian fakir miskin dilakukan melalui peningkatan keterampilan, motivasi dan pendampingan yang intens dalam rangka menumbuhkan rasa percaya diri, mempermudah akses pemasaran dan kendala permodalan. Sinergitas program penanganan fakir miskin dengan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menuntut meningkatnya kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Rehabilitasi sosial bagi PPKS dengan gangguan keterlantaran, kecacatan, dan ketunasosialan memerlukan peningkatan kualitas pemberi layanan terutama PSKS sebagai ujung tombak pelayanan sosial di masyarakat. Aktivitas, peran serta, kerja sama, soliditas dan semangat PSKS dalam upaya pelayanan dan penanganan masalah PPKS tidak diragukan lagi namun bekal untuk selalu meningkatkan kualitas agar terus bisa beradaptasi dengan setiap perubahan peraturan dan kebijakan kurang didapat dengan maksimal sehingga harus diupayakan peningkatan kapasitas dan kualitas PSKS melalui Bimbingan Teknis/Diklat pelayanan sosial. Disamping peran serta PSKS, kepedulian keluarga, lingkungan/masyarakat sekitar domisili PPKS akan sangat membantu dan meningkatkan efektivitas penanganan PPKS baik berupa pendampingan, bimbingan maupun motivasi agar PPKS bisa menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dan bermartabat. Namun elemen masyarakat ini juga perlu mendapatkan sosialisasi dan pengetahuan serta motivasi yang bisa menggugah empati mereka terhadap lingkungan sekitar sehingga bisa terjalin sinergi dengan pemerintah dalam pelayanan kesejahteraan sosial.

Keterbatasan sarana dan prasarana menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan sosial bagi PPKS yang memerlukan layanan lanjutan. Kondisi ini belum didukung adanya tempat penampungan sementara yang representatif bagi PMKS/PPKS yang mengalami permasalahan sosial akut ketika menunggu antrian dirujuk ke unit rehabilitasi sosial milik provinsi/kementerian. Pengelolaan shelter PMKS/PPKS kurang optimal karena keterbatasan SDM. Sedangkan di Kota Blitar hanya ada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Anak yang tentunya pelayanannya terbatas hanya untuk anak, belum mengakomodir PPKS selain anak. Dari uraian permasalahan tersebut maka ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih cukup tinggi;
2. Belum optimalnya kapasitas dan kualitas SDM Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan peran serta keluarga/masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial;
3. Belum maksimalnya pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);

4. Belum tersedianya Sarana Prasarana Pelayanan Sosial skala Kabupaten/Kota bagi PMKS terlantar.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Sosial dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena Renja tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD, Renja Dinas Sosial juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Walikota Blitar.

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja Dinas Sosial Kota Blitar disajikan dalam Tabel berikut :

Tabel 2.4.1
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Blitar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,8 Indeks	4.483.286.021	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,8 Indeks	4.491.536.521	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	16.207.200	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	16.207.200	
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	3.093.800	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	3.093.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Lap	13.113.400	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Lap	13.113.400	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	3.543.108.900	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	3.543.108.900	
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Org/ bln	3.540.015.300	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Org /bl n	3.540.015.300	
2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Lap	3.093.600	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Lap	3.093.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	110.100.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	110.100.000	
3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	30.100.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	30.100.000	
3.2	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	28 Orang	80.000.000	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	28 Orang	80.000.000	
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	225.720.497	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	233.970.997	
4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	1 Paket	9.989.500	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	1 Paket	9.989.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	14.597.100	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	15.747.100	Menyesuaikan kebutuhan
4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 Paket	24.999.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 Paket	24.999.000	
4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10 Paket	28.025.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10 Paket	28.025.000	
4.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	24.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	24.000.000	
4.6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	5.400.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	5.400.000	
4.7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Lap	118.709.897	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Lap	125.810.397	Menyesuaikan kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	3.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	3.000.000	
5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.000.000	
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	470.526.524	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	470.526.524	
6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Lap	87.641.724	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Lap	87.641.724	
6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Lap	382.884.800	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Lap	382.884.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	114.622.900	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	114.622.900	
7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	77.698.900	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	77.698.900	
7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit		Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit		
7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara	40 Unit	26.727.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara	40 Unit	26.727.000	
7.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	10.197.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	10.197.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
II	Program Pemberdayaan sosial		Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100 %	1.380.591.700	Program Pemberdayaan sosial		Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100 %	635.537.100	
1	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial	100 %	1.380.591.700	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial	100 %	635.537.100	
1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Lembg	1.380.591.700	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Lembg	635.537.100	Beralihnya fungsi pembinaan juru kunci makam dan modin kematian ke DPRKP
III	Program Rehabilitasi sosial		Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	0,89 %	944.437.450	Program Rehabilitasi sosial		Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	0,89 %	936.187.250	
1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang		Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang	100 %	658.044.700	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang		Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang	100 %	649.794.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
	Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			
1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Org	347.426.200	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Org	347.426.200	
1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Org	4.898.000	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Org	4.898.000	
1.3	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	321 Org	276.427.100	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	321 Org	268.176.900	Mengurangi kegiatan ceremonial

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
1.4	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Org	29.293.400	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Org	29.293.400	
2	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Persentase penyandang disabilitas terlantar dan Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	286.392.750	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Persentase penyandang disabilitas terlantar dan Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	286.392.750	
2.1	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	360 Org	257.837.900	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	360 Org	257.837.900	
2.2	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Org	28.554.850	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Org	28.554.850	
IV	Program Perlindungan dan jaminan sosial		Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial	1,4 %	18.463.699.320	Program Perlindungan dan jaminan sosial		Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial	1,4 %	18.456.661.620	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
			Persentase peningkatan PMKS Terlatih	19,5 %				Persentase peningkatan PMKS Terlatih	19,5 %		
1	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase data DTKS yang diverval	100 %	18.463.699.320	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase data DTKS yang diverval	100 %	18.456.661.620	
			Persentase Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial	100 %				Persentase Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial	100 %		
			Persentase PMKS Terlatih	20 %				Persentase PMKS Terlatih	20 %		
1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	100 Kelurg	103.955.900	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	100 Kelurg	103.955.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
1.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	9584 Kelrg	17.730.512.371	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	9584 Kelrg	17.723.474.671	Mengurangi kegiatan ceremonial
1.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orng	629.231.049	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orng	629.231.049	
V	Program Penanganan Bencana		Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota (SPM)	100 %	209.306.300	Program Penanganan Bencana		Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota (SPM)	100 %	216.343.800	
1	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase korban bencana yang memperoleh bantuan sosial	100 %	47.491.700	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase korban bencana yang memperoleh bantuan sosial	100 %	47.491.700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orng	24.991.800	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orng	24.991.800	
1.3	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	89 Orng	24.991.800	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	89 Orng	24.991.800	
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase TAGANA yang terampil dalam penanganan pasca bencana	90 %	161.814.600	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase TAGANA yang terampil dalam penanganan pasca bencana	90 %	168.852.100	
2.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Orng	161.814.600	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Orng	168.852.100	Tambahan anggaran untuk kegiatan dapur umum

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
VI	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Persentase TMP dalam kondisi baik	100 %	34.999.300	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Persentase TMP dalam kondisi baik	100 %	34.999.300	
1	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Persentase TMP yang terpelihara	100 %	34.999.300	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Persentase TMP yang terpelihara	100 %	34.999.300	
1.1	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	974 Makam	34.999.300	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	974 Mkm	34.999.300	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja OPD, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan kegiatan yang berasal aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD.

Dinas Sosial Kota Blitar berupaya untuk menampung aspirasi masyarakat salah satunya melalui pelaksanaan Musrenbang dan pokok-pokok pikiran legislatif. Selanjutnya semua usulan ditelaah dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial untuk ditetapkan apakah usulan tersebut diakomodir atau tidak. Rekapitulasi hasil Musrenbang dan Pokok-Pokok Pikiran Legislatif disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.5.1
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Blitar

Nama PD : Dinas Sosial

NO	USULAN	PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
I	Musrenbang	NIHIL				
II	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	NIHIL				

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Propinsi

Salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2019-2024 yang selaras dengan amanah pembangunan di bidang sosial adalah meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dengan arah kebijakan pengurangan pengangguran dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Arah kebijakan Kementerian Sosial dalam rangka mendukung hal tersebut antara lain meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan, meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial serta meningkatnya kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Dalam rangka meningkatkan kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan dilakukan melalui upaya pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan keberfungsian sosial dengan pengembangan sistem rehabilitasi sosial dalam rangka memulihkan disfungsi sosial, peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan. Peningkatan kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Peningkatan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial melalui penguatan skema layanan dan pendataan terpadu yang partisipatif, tepat, cepat, efektif dan terintegrasi, peningkatan kualitas DTKS yang memasukkan indikator kemiskinan dan kerentanan multi dimensi serta pengembangan metode perangkungan penduduk yang konsisten dengan sistem graduasi masing-masing program.

Selaras dengan prioritas nasional tersebut, provinsi Jawa Timur menetapkan prioritas Jawa Timur dalam RPJMD 2019-2024 adalah peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan memerlukan sinergi program dan kegiatan antara pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Sosial merumuskan kebijakan yang mencerminkan pelaksanaan visi dan misi Gubernur yaitu terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial dengan memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan dengan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan meningkatkan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Prioritas kebijakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur antara lain mendukung percepatan penanganan kemiskinan di Jawa Timur melalui perluasan target sasaran penerima PKH Plus hingga 38 kabupaten/kota dengan komponen lanjut usia ≥ 70 tahun, disabilitas berat dan wanita rawan sosial ekonomi, pengembangan KUBE fakir miskin sebagai embrio usaha mikro, serta mendorong kabupaten/kota untuk aktif update data melalui SIKS NG.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kota Blitar

Penyusunan arah kebijakan pembangunan Kota Blitar tidak terlepas dari arah kebijakan nasional maupun provinsi. Selaras dengan prioritas ketiga nasional “Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing” dan prioritas provinsi Jawa Timur “Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan”, ditetapkan tema pembangunan Kota Blitar tahun 2024 yaitu “Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan infrastruktur yang berkualitas serta tata ruang yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan hidup dan berkeadilan”, dengan penekanan pada peningkatan

kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup. Tema tersebut sejalan dengan upaya pencapaian misi ke 4 RPJMD 2021-2026 yaitu “Meningkatkan infrastruktur dan tata ruang yang berawasan lingkungan hidup yang berkeadilan”. Dinas Sosial Kota Blitar sebagai salah satu Perangkat Daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah, turut mendukung salah satu prioritas daerah tahun 2024 yaitu “Pemulihan ketahanan ekonomi sebagai akibat dampak covid 19”.

Dinas Sosial Kota Blitar sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial di daerah, merupakan OPD teknis yang akan menyelenggarakan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan sosial sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial serta Program Penanganan Bencana disinergikan dengan program pusat, provinsi, antar OPD se Kota Blitar bahkan tidak menutup kemungkinan dengan kabupaten/kota lain serta pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat merupakan wujud nyata upaya Dinas Sosial Kota Blitar untuk meningkatkan pelayanan terhadap PPKS. Disamping itu Dinas Sosial juga melaksanakan tugas pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan daerah, Dinas Sosial sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah menetapkan tujuan dan sasaran Renja yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Wali Kota. Berdasarkan misi yang diemban maka tujuan yang ingin dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Blitar adalah “Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin” dan “Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat”. Sebagai penjabaran tujuan, dirumuskan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tahunan. Dalam kondisi ideal penerapan sasaran akan sangat baik apabila sasaran ditetapkan secara spesifik, dapat diukur, dapat dicapai jangka panjang, waktu penyampaianya jelas, berorientasi pada hasil nyata. Dalam mengemban tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Sosial Kota Blitar sebagai berikut :

Tabel : 3.2.1
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kota Blitar
Tahun 2024

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/TARGET 2024	FORMULASI PERHITUNGAN
<u>Tujuan 1 :</u> Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah <u>Sasaran 1 :</u> Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Target : 84,43 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Target : 84,4	
<u>Tujuan 2 :</u> Menurunkan ketimpangan antar penduduk miskin	Indeks Keparahan Kemiskinan Target : 0,23	BPS

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/TARGET 2024	FORMULASI PERHITUNGAN
<u>Sasaran 2 :</u> Meningkatnya penanganan fakir miskin	Persentase fakir miskin yang berdaya Target : 10%	$\frac{\text{Jml fakir miskin peserta pelatihan yang bekerja/ mulai merintis usaha pada thn n-1}}{\text{Jml fakir miskin peserta pelatihan pada thn n-1}} \times 100\%$
<u>Tujuan 3 :</u> Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase PMKS Target : 7,26%	$\frac{\text{Jumlah PMKS}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$
<u>Sasaran 3 :</u> Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penurunan PMKS Target : 1,49%	$\frac{(\text{Jumlah PMKS thn n-1}) - (\text{Jml PMKS thn n})}{\text{Jml PMKS thn n-1}} \times 100\%$

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Sosial maka diperlukan rencana yang jelas terstruktur yang dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Berdasarkan Keputusan menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka ditetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel : 3.3.1
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR DISI SESUAI TABEL RKPD 2024		
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Mendukung pencapaian Tupoksi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
1.06.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Mendukung pencapaian Tupoksi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
1.06.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.02	Program Pemberdayaan sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Mendukung pencapaian Tupoksi, Tematik RB dan SAKIP
1.06.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial	Mendukung pencapaian Tupoksi, Tematik RB dan SAKIP
1.06.02.2.03.04	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, Tematik RB dan SAKIP
1.06.04	Program Rehabilitasi sosial	Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK dan RB Tematik Kemiskinan
1.06.04.2.01	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK dan RB Tematik Kemiskinan
, S1.06.04.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK dan RB Tematik Kemiskinan
1.06.04.2.01.02	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK dan RB Tematik Kemiskinan
1.06.04.2.01.05	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK dan RB Tematik Kemiskinan
1.06.04.2.01.12	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK dan RB Tematik Kemiskinan
1.06.04.2.02	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan	Persentase penyandang disabilitas terlantar dan Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK dan RB Tematik Kemiskinan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
	Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		
1.06.04.2.02.07	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK dan RB Tematik Kemiskinan
1.06.04.2.02.13	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK dan RB Tematik Kemiskinan
1.06.05	Program Perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial	Mendukung pencapaian Tupoksi, Tematik RB Kemiskinan dan SAKIP
		Persentase peningkatan PMKS Terlatih	
1.06.05.2.02	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data DTKS yang diverval	Mendukung pencapaian Tupoksi, Tematik RB Kemiskinan dan SAKIP
		Persentase Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial	
		Persentase PMKS Terlatih	
1.06.05.2.02.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, Tematik RB Kemiskinan dan SAKIP
1.06.05.2.02.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, Tematik RB Kemiskinan dan SAKIP
1.06.05.2.02.04	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, Tematik RB Kemiskinan dan SAKIP
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota (SPM)	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK
1.06.06.2.01	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang memperoleh bantuan sosial	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
1.06.06.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK
1.06.06.2.01.04	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK
1.06.06.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase TAGANA yang terampil dalam penanganan pasca bencana	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK
1.06.06.2.02.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP dalam kondisi baik	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.07.2.01	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang terpelihara	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.07.2.01.02	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial bertolak pada pencapaian visi dan misi Kota Blitar yang ingin dicapai yang dijabarkan dan RPJMD Kota Blitar tahun 2021 – 2026 dan Renstra Dinas Sosial tahun 2021-2026. Dinas Sosial Kota Blitar melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang mengemban misi ketiga Kota Blitar sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026 yaitu “Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital” pada tujuan “Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat” dengan sasaran :

1. Menurunnya tingkat ketimpangan antar penduduk miskin.
 2. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat.
- Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Blitar tersebut Dinas Sosial menyusun dokumen Rencana Kerja tahun 2024 yang menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, lokasi dan pendanaan indikatif berdasarkan Renstra tahun 2021-2026 dan RKPD Kota Blitar 2024, hasil analisis capaian kinerja tahun sebelumnya dengan memperhatikan rencana tindak lanjut LKjIP tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Rencana Tindak Lanjut LKjIP Dinas Sosial Tahun 2022
Pada Renja Dinas Sosial Tahun 2024

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
1.	Pendampingan/ motivasi usaha/ pemberdayaan dan bantuan akses pemasaran melalui sinergi OPD/stake holder terkait	Melakukan monitoring, pendampingan dan motivasi usaha kepada eks peserta pelatihan keterampilan dengan stake holder terkait dalam rangka mendorong terciptanya wira usaha baru	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
		Mempromosikan produk PPKS melalui even-even daerah sebagai upaya memperluas akses pemasaran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
			Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
2.	Peningkatan jejaring kerja sama dan sinergi antar OPD, Kab/Kota lain, Dinas Sosial Provinsi, Kementerian Sosial maupun pilar-pilar sosial dalam penanganan PMKS	Melakukan koordinasi dan jejaring kerja sama dan sinergi antar OPD, Kab/Kota lain, Dinas Sosial Provinsi, Kementerian Sosial maupun pilar-pilar sosial dalam penanganan PMKS	Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Sub Kegiatan Layanan Rujukan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Sub Kegiatan Layanan Rujukan
3.	Peningkatan kapasitas PSKS melalui pembinaan dan bimbingan teknis pelayanan kesejahteraan sosial	Melaksanakan pembinaan/bimbingan teknis kepada PSKS (TKSK, PSM, Karang Taruna, LKS, Orsos) dengan materi yang berkaitan dengan masalah sosial yang menonjol	Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
			Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota

Adapun rencana kerja dan pendanaan Dinas Sosial tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Blitar

OPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Kota Blitar						
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				24.771.265.591				29.347.874.291
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		82,8 Indeks	4.491.536.521			82,8 Indeks	4.647.257.652
1.06.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100 %	16.207.200			100 %	15.028.056
1.06.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 Dok	3.093.800	DAU		7 Dok	9.181.818

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Laporan	13,113,400	DAU		12 Laporan	5.846.238
1.06.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100 %	3.543.108.900			100 %	3.495.963.073
1.06.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		28 Org/bln	3.540.015.300	DAU		28 Org/bln	3.490.254.361
1.06.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD		12 Laporan	3.093.600	DAU		12 Laporan	5.708.712

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 %	110.100.000			100 %	156.679.450
1.06.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	30.100.000	DAU		2 Paket	45.000.000
1.06.01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan		28 Orang	80.000.000	DAU		28 Orang	111.679.450
1.06.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 %	233.970.997			100 %	359.457.206,00
1.06.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia		1 Paket	9.989.500	DAU		1 Paket	16.061.815

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		3 Paket	15.747.100	DAU		3 Paket	17.000.000
1.06.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		5 Paket	24.999.000	DAU		5 Paket	24.675.008
1.06.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		10 Paket	28.025.000	DAU		10 Paket	33.467.241
1.06.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		1 Paket	24.000.000	DAU		1 Paket	32.662.505
1.06.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	5.400.000	DAU		12 Dokumen	18.753.525

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		40 Laporan	125.810.397	DAU		40 Laporan	216.837.112
1.06.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan		100 %	3.000.000			100 %	9.261.000
1.06.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit	3.000.000	DAU		2 Unit	9.261.000
1.06.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100 %	470.526.524			100 %	480.458.243
1.06.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		48 Laporan	87.641.724	DAU		48 Laporan	112.058.243
1.06.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		13 Laporan	382.884.800	DAU		13 Laporan	368.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar		100 %	114.622.900			100 %	130.410.624
1.06.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		15 Unit	77.698.900	DAU		15 Unit	93.889.523
1.06.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara		40 Unit	26.727.000	DAU		40 Unit	22.050.788
1.06.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1 Unit	10.197.000	DAU		1 Unit	14.470.313
1.06.02	Program Pemberdayaan sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		100 %	635.537.100			100 %	1.479.017.239

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial		100 %	635.537.100			100 %	1.479.017.239
1.06.02.2.03.04	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		8 Lembaga	635.537.100	DAU		8 Lembaga	1.479.017.239
1.06.04	Program Rehabilitasi sosial	Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial		0,89 %	936.187.250			0,88 %	974.910.216
1.06.04.2.01	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100 %	649.794.500			100 %	585.438.398

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.04.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		130 Org	347.426.200	DAU		130 Org	387,838,409
1.06.04.2.01.02	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		10 Org	4.898.000	DAU		10 Org	5,675,141
1.06.04.2.01.05	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		321 Org	268.176.900	DAU		321 Org	127,636,028
1.06.04.2.01.12	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		10 Org	29.293.400	DAU		10 Org	64,288,820

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.04.2.02	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar dan Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100 %	286.392.690			100 %	389.471.818
1.06.04.2.02.07	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		360 Org	257.837.900	DAU		360 Org	291,408,826
1.06.04.2.02.13	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		20 Orang	28.554.850	DAU		20 Orang	98,062,992
1.06.05	Program Perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial		1,4 %	18.456.661.620			1,42 %	21.512.157.761
		Persentase peningkatan PMKS Terlatih		19,5 %				24,2 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.05.2.02	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data DTKS yang diverval		100 %	18.456.661.620			100 %	21.512.157.761
		Persentase Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial		100 %			100	%	
		Persentase PMKS terlatih		20 %			20	%	
1.06.05.2.02.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		100 Keluarga	103.955.958	DAU		100 Kelurga	282,897,966
1.06.05.2.02.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		9584 Keluarga	17.723.474.671	DAU, DBHCHT		9584 Keluarga	21,229,259,795

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.05.2.02.04	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		80 Orang	629.231.049	DAU, DBHCHT		80 Orang	263,209,891
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota (SPM)		100 %	216.343.800			100 %	399.400.652
1.06.06.2.01	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang memperoleh bantuan sosial		100 %	47.491.700			100 %	65.380.576
1.06.06.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		70 Orang	22.499.900	DAU		70 Orang	23,418,985

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.06.2.01.04	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota		89 Orang	24.991.800	DAU		89 Orang	41,961,591
1.06.06.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase TAGANA yang terampil dalam penanganan pasca bencana		90 %	168.852.100			94 %	334,020,076
1.06.06.2.02.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		28 Orang	168.852.100	DAU		28 Orang	334,020,076
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP dalam kondisi baik		100 %	34.999.300			100 %	71.920.880

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.07.2.01	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang terpelihara		100 %	34.999.300			100 %	71.920.880
1.06.07.2.01.02	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota		974 Makam	34.999.300	DAU		974 Makam	71.920.880

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 Dinas Sosial Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, sebagai penjabaran Renstra Dinas Sosial dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2024. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya dan tahun berjalan.

1.1 Catatan penting dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2024 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai nilai yang strategis dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kota Blitar.

Renja ini disusun melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan, memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator dan kerangka pendanaannya, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

1.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Sosial Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2024 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

1.3 Rencana Tindak lanjut

Dalam rangka pencapaian target kinerja organisasi, Dinas Sosial merencanakan tindak lanjut sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator/target indikator serta kebutuhan anggaran berpedoman pada Renja Dinas Sosial Tahun 2024.
- b. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait, pilar-pilar sosial dan seluruh stake holder dalam pelaksanaan Renja ini sehingga akan dicapai hasil kinerja yang optimal.
- c. Meningkatkan kapasitas SDM pelaksana dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta program, kegiatan dan sub kegiatan sejalan dengan tuntutan perkembangan layanan bidang sosial.

Akhirnya, Rencana Kerja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2024. Program dan kegiatan Dinas Sosial tahun 2024 diharapkan dapat memberikan pelayanan kesejahteraan sosial yang maksimal guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat umumnya.